



RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TA. 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TA. 2024



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR **III** TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - e. BAB V. PENUTUP.
- (3) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1451

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025 ini.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, yang disusun berpedoman kepada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, Juli 2024



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Batam

Imam Tohari, S.H., M.H
Pembina (IV/b)
NIP. 19730510 200701 1 033

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR TABEL 3

DAFTAR GAMBAR 3

BAB I PENDAHULUAN..... 4

 1.1 Latar Belakang 4

 1.2 Landasan Hukum 7

 1.3 Maksud dan Tujuan 10

 1.4 Sistematika Penulisan 11

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 12

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan
 Capaian Renstra Perangkat Daerah 12

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 25

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
 Daerah 28

 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 34

 2.5 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 44

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 45

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 45

 3.2. Tujuan, dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 47

 3.3 Program dan Kegiatan 48

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 62

BAB V PENUTUP 71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024.....	14
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.....	26
Tabel 2.3.	Capaian Kinerja Penyelesaian Gangguan Trantibum, dan Pelanggaran Perda dan Perkada Tahun 2023.....	29
Tabel 2.4	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.....	29
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	35
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2025.....	44
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.....	48
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Batam.....	52
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	6
Gambar 1.2	Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dikumen Perencanaan Lainnya.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Agar pembangunan daerah lebih terarah dan terukur maka diperlukan perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1

(satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

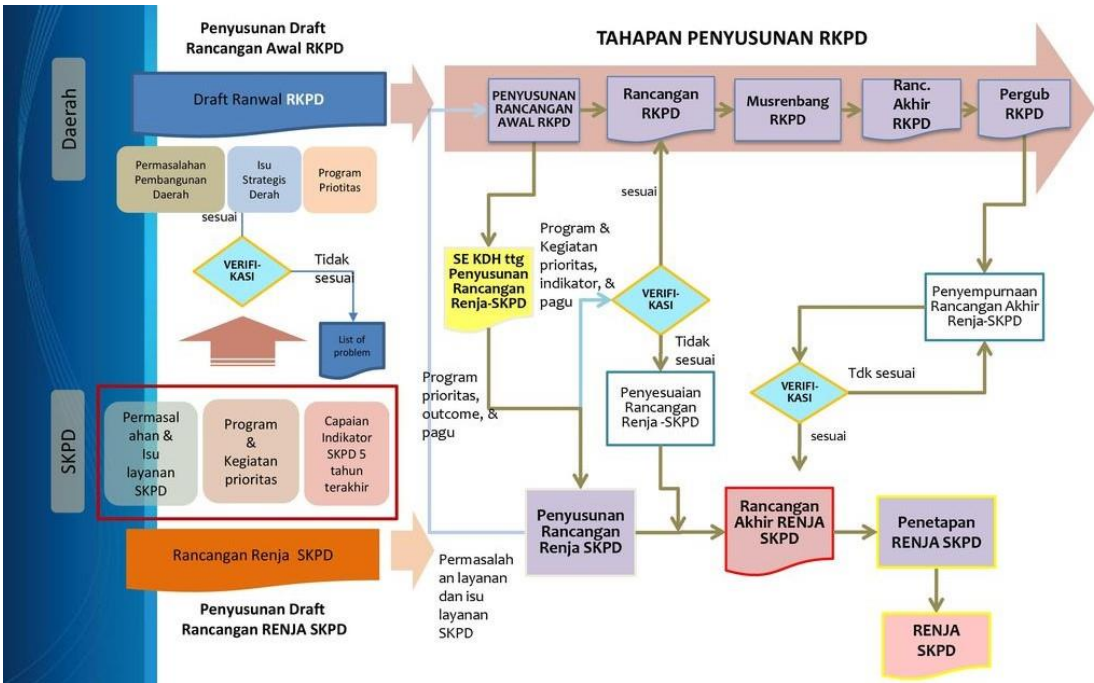
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan. Penyusunan Renja harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Tahapan penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar berikut ini:



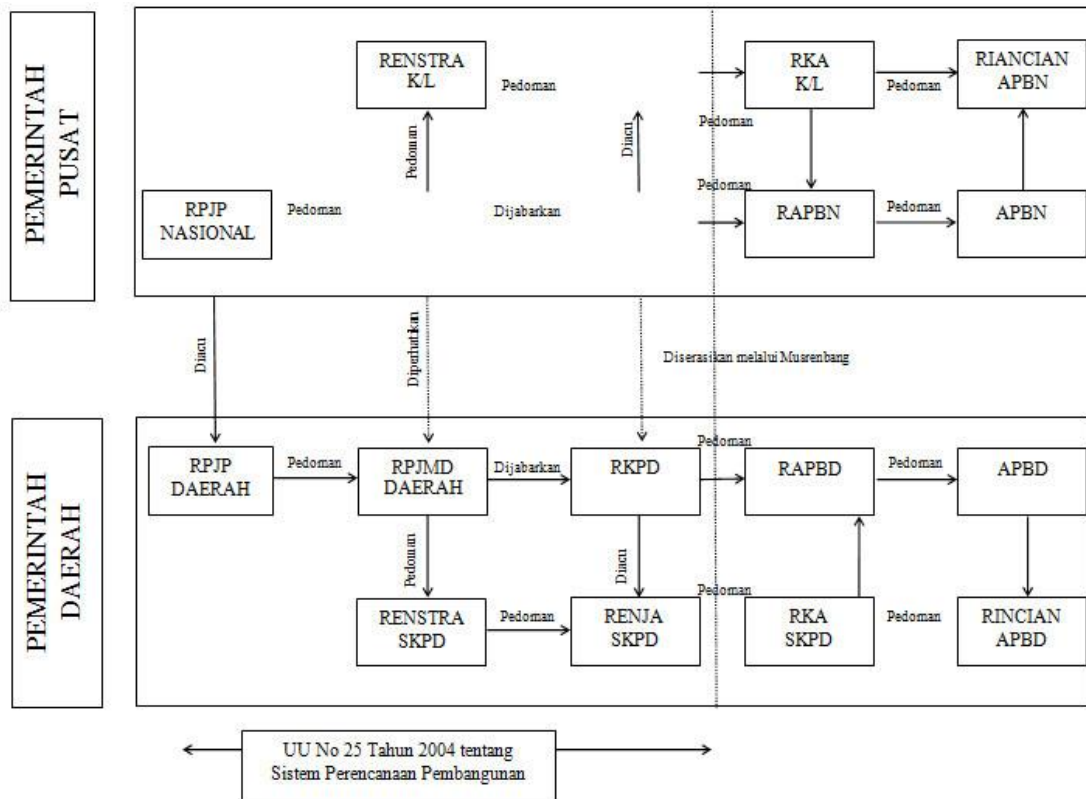
Gambar 1.1

Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam Menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana

- Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 550);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 - t. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - u. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
 - v. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);

- w. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2);
- x. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);
- y. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3);
- z. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 127);
- aa. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 864);
- bb. Peraturan Walikota Batam Nomor 214 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1082)
- cc. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem kerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1152).
- dd. Peraturan Walikota Batam Nomor 83 Tahun 2024 Tentang RKPD Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1423)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah untuk memberikan gambaran program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025 adalah untuk menyingkronkan dan menyinergikan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, yaitu pengertian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja (Renja), keterkaitan Rencana Kerja (Renja) dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana kerja (Renja) dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam merencanakan 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan, yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota:
 - a) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
 - b) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
 - c) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
 - d) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota:
 - a) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - b) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota:
 - a) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Program dan kegiatan tersebut diakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sama sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renja.

Berikut ini disajikan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan pencapaian Renstra:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum									
01:05:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1.05.01. 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	195 Orang/Bulan	194 Orang	199 Orang	188 Orang	94,47	189 Orang/ Bulan	189 Orang/bulan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	27 Dokumen	324 Dokumen	276 Dokumen	85.19	324 Dokumen	324 Dokumen	100
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	0	0	2 Paket	2 Paket	100
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100%
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	6 Paket	7 Paket	7 Paket	100	7 Paket	7 Paket	100%
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100	3 paket	3 paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100	3 Paket	3 Paket	100
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	11 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100
1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang Disediakan	5 Paket	-	4 Paket	0	0	4 Paket	4 Paket	100
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	8 Unit	40 Unit	4 Unit	10%	68 Unit	68 Unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	48 Laporan	38 Laporan	100	37 Laporan	37 Laporan	100
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	72 Laporan	72 Laporan	100	72 Laporan	72 laporan	100
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	2 Unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	11 Unit	11 Unit	100	11 Unit	11 Unit	100
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	32 Unit	45 Unit	35 Unit	77.78	77 Unit	77 Unit	100
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	100	2 Unit	2 Unit	100
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1. Persentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase Satlinmas yang Terlatih dan Dikukuhkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase Polisi Pamongpraja yang Memenuhi Standar Kualifikasi	100%	48%	61%	55%	90%	74%	100%	100%
		4. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	4 Laporan	-	4 Laporan	1 Laporan	25%	4 Laporan	4 Laporan	100%
		5. Persentase jenis sarpras Trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten dan kota	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	-	0%	5 Dokumen	5 Dokumen	100
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	26 Orang	18 Orang	35 Orang	15 Orang	42.86%	42 Orang	42 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan kejahatan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	100 Kasus	24 Kasus	100 Kasus	100 Kasus	100	100 Laporan	100 Laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	30 Kasus	21 Kasus	37 Kasus	19 Kasus	51.35	54 Laporan	54 Laporan	100
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	4 laporan	4 Laporan	100
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	15 Unit	-	9 Unit	9 Unit	100	9 Unit	9 Unit	100
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Pelaku Usaha	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	0	11 Laporan	11 Laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02.2.02.0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	6 Laporan	9 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	30 Laporan	20 Laporan	34 Laporan	22 Laporan	64.71%	30 Laporan	30 Laporan	100
1.05.02.2.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Satpol PP	8.72%	4.37%	5,34%	5,34%	100%	5,34%	6,31%	100
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	3 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50%	3 Laporan	3 Laporan	100

Dari pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2023, ada program, kegiatan, dan sub kegiatan yang memenuhi target kinerja dan melebihi target kinerja yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2023 dan Renstra dengan rincian sebagai berikut:

a. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja Renja Tahun 2023:

- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan realisasi 100%, sehingga tingkat capaian kinerja Renja dan Renstra juga 100%;
- 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi 100%, sehingga tingkat capaian kinerja Renja dan Renstra juga 100%;
- 3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan realisasi 100%, sehingga tingkat capaian kinerja Renja dan Renstra juga 100%;
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi 100%, sehingga tingkat capaian kinerja Renja dan Renstra juga 100%;
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi 100%, sehingga tingkat capaian kinerja Renja dan Renstra juga 100%;

b. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja Renja Tahun 2023:

- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Kabupaten Kota, pada Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, di mana selama tahun 2023, aksi unjuk rasa yang ditangani sebanyak 30 unjuk rasa, sedangkan target Renja sebanyak 15 unjuk rasa.

Banyaknya aksi unjuk rasa yang ditangani disebabkan banyaknya penolakan terhadap UU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law), dan tuntutan dan penolakan terhadap UMK Batam tahun 2023 Serta Relokasi Warga Palestina dan Masyarakat Rempang..

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023 telah memenuhi target kinerja Perubahan Renja 2023 dan Renstra, meskipun ada kegiatan yang tidak dilaksanakan akibat rasionalisasi. Oleh karena itu ke depan diperlukan dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Batam melalui TAPD dalam memberikan pagu anggaran yang cukup kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat memenuhi target kinerja Renja

maupun Renstra.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan urusan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dalam Renstra Tahun 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja merencanakan 2 (dua program) yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Berikut ini adalah pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tahun 2023:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 n-1	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 n-1	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			14.30%	16.70%	20%	25%	13.19%	16.69%	19.87%	25%	
2.	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan			84	86	88	90	83.73	86.06	88	90	
3.	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	
4.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	
5.	Persentase Penegakan Perda dan Perkada		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 n-1	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 n-1	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
6.	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Dari tabel capaian kinerja yang disajikan di atas, dapat dilihat bahwa realisasi dari semua indikator kinerja mencapai 100%. Dengan demikian capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tahun 2023 sangat baik.

Analisis tersebut meliputi uraian sebagai berikut :

1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan pencapaian 13.19%
2. Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan dengan pencapaian 83.73
3. Tercapainya Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah dengan pencapaian 100%
4. Tercapainya Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dengan capaian 100%
5. Tercapainya Persentase Penegakan Perda dan Perkada dengan Capaian 100%
6. Tercapainya Persentase warga Negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada dengan capaian 100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam 2021-2026, indikator kinerja program yang ditetapkan adalah:

- 1) Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan, dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah gangguan Trantibum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah gangguan Trantibum yang dilaporkan Masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100\%$$

- 2) Persentase Penegakan Perda dan Perkada, dengan rumus perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda dan perkada yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100\%$$

- 3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada dengan rumus perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak akibat penegakan Perda dan Perkada}}{\text{Jumlah warga negara yang terkena dampak akibat penegakan Perda dan Perkada}} \times 100\%$$

Capaian kinerja penyelesaian gangguan Trantibum, penegakan Perda dan Perkada, dan layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Penyelesaian Gangguan Trantibum, dan Pelanggaran Perda dan Perkada Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus yang Selesai	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	534	534	100%
2	Persentase penegakan Perda dan Perkada	100%	743	743	100%
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	100%	1	1	100%

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Pemerintah Kota Batam sedang giatnya melakukan pembangunan infrastruktur khususnya jalan seluruh wilayah Kota Batam dalam upaya untuk mendukung pengembangan pariwisata. Namun banyaknya lahan yang dikuasai oleh masyarakat tanpa dokumen yang legal serta tidak sesuai dengan rencana tata ruang telah menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban dan keindahan bagi Kota Batam.

Sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu saja ditemukan masalah-masalah yang dapat menghambat pencapaian kinerja. Beberapa permasalahan umum yang dapat diidentifikasi oleh Satpol PP Kota Batam terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih tingginya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kententraman dan ketertiban umum	1. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan daerah masih kurang
			2. Kesulitan ekonomi dan kesejahteraan sosial

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Masih tingginya pelanggaran terhadap peraturan daerah	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum Penegakan terhadap pelanggaran peraturan daerah masih kurang	1. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan daerah masih kurang 2. Kesulitan ekonomi dan kesejahteraan sosial
3	Gangguan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat tinggi	Penerapan sistem keamanan lingkungan masih kurang	Jumlah Linmas masih sedikit dan kurang diberdayakan
4	Belum maksimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	1. Kualitas SDM aparatur masih kurang 2. Sarana dan prasarana masih terbatas	Alokasi anggaran pengembangan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana terbatas

Sumber: Hasil analisis

Permasalahan umum Kota Batam adalah tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap peraturan perundangan, dan untuk urusan Trantibum, gangguan dan pelanggaran Trantibum dan Perda juga cukup tinggi. Pelanggaran-pelanggaran itu disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ada di Kota Batam. Tingginya gangguan dan pelanggaran Trantibum dan Perda berakar dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di Kota Batam. Selain itu kualitas SDM aparatur juga berperan terhadap penegakan gangguan dan Pelanggaran Trantibum dan Perda/Perkada.

Dalam hal perlindungan masyarakat, jumlah satlinmas yang ada saat ini belum terpenuhi secara maksimal sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Oleh karena itu, menindaklanjuti hal tersebut, pada bulan September 2022 Satpol PP Kota Batam telah membuat terobosan dengan membentuk Praja Pembina Perlindungan Masyarakat (Prabinmas) dengan program 1 anggota Satpol PP ditempatkan di 1 kelurahan yang bertugas sebagai pembina petugas/anggota linmas yang ada di wilayah kelurahan terkait dan bersinergi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir kekurangan petugas linmas di kelurahan. Dan pada tanggal 30 Oktober 2023 Satpol PP telah meluncurkan sebuah aplikasi digital bernama SIAP GARDA yaitu sebuah aplikasi respon cepat pelaporan masyarakat melalui system pelaporan tindak pidana ringan (Perda) atau perkada Kota Batam.

2.3.3 Peluang dan Tantangan

Sejak pertama kali dikembangkan menjadi Kota industri, perdagangan, jasa dan alih kapal pada awal tahun 1970an, Kota Batam telah mengalami banyak kemajuan. Pengembangan Kota Batam oleh Pemerintah Pusat tak terlepas dari letak Kota Batam yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga dan daerah-daerah yang menjadi lalu lintas perdagangan internasional, hal ini tentu berimplikasi positif pada posisi geostrategik Kota Batam. Dalam perspektif ekonomi, wilayah Kota Batam menjadi daya tarik bagi negara tetangga untuk berinvestasi dan merelokasi aktivitas ekonomi mereka ke Batam, mulai dari aktivitas industri, perdagangan maupun jasa.

Pengembangan dan kemajuan Kota Batam juga menjadi daya tarik bagi pendatang dari berbagai daerah sehingga menjadikan kota ini kota yang heterogen dengan multikultur dan menjadi miniatur Indonesia karena hampir semua etnis dan agama terdapat di kota ini yang berdampak kepada meningkatnya jumlah penduduk.

Kondisi ini selain berdampak positif yaitu menambah khasanah kekayaan budaya juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Jumlah penduduk yang banyak dan heterogen sangat rawan menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Hal ini berdampak pada meningkatnya gangguan trantibum karena usaha yang di jalankan di trotoar dan bahu jalan tersebut mengganggu lalu lintas di ruas jalan. Ini menjadi tantangan sendiri bagi satpol pp dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kota batam.

2.3.4 Isu-Isu Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu-isu strategis harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Beberapa isu strategis Kota Batam yang tertuang dalam Rencana Strategis RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Adaptasi terhadap Normal Baru pasca wabah Covid-19

- b. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. Reformasi Birokrasi;
- d. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- g. Mewujudkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional;
- h. Menciptakan Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional;
- i. Pembangunan gender dan pemberdayaan kelompok difabel dan kelompok rentan;
- j. Peluang Pembiayaan Pembangunan Non APBD.

Dari 10 (sepuluh) isu strategis Kota Batam di atas, akan dipilih isu-isu strategis Kota Batam yang relevan dan penting bagi Satpol PP. Isu-isu strategis Kota Batam yang relevan dan penting bagi Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah:

- a. Mengembangkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing

Salah satu mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum adalah standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat. Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Linmas perlu dilakukan untuk mengembangkan kompetensi dan keahlian agar cakap dalam menghadapi, menangani dan menyelesaikan pelanggaran Perda dan Perkada serta gangguan Trantibum. Dalam hal perlindungan masyarakat (linmas) telah dibentuk Praja Pembina Perlindungan Masyarakat (Prabinmas) dengan program 1 orang anggota Satpol PP ditempatkan untuk 1 kelurahan yang ada di Kota Batam. Dan pada tanggal 30 Oktober 2023 Satpol PP telah meluncurkan sebuah aplikasi digital bernama SIAP GARDA yaitu sebuah aplikasi respon cepat pelaporan masyarakat melalui system pelaporan tindak pidana ringan (Perda) atau perkada Kota Batam.

- b. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Pemerintah Kota Batam sedang giatnya melakukan pembangunan infrastruktur khususnya jalan seluruh wilayah Kota Batam dalam upaya untuk mendukung pengembangan pariwisata.

Namun banyaknya lahan yang dikuasai oleh masyarakat tanpa dokumen yang legal serta tidak sesuai dengan rencana tata ruang telah menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban dan keindahan Kota Batam.

Oleh karena itu penataan bahu jalan guna mendukung peningkatan infrastruktur pada jalan-jalan utama dan penertiban Kawasan-kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukan terus dilakukan oleh Satpol PP bersama tim terpadu.

c. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Batam. Isu reformasi birokrasi selalu relevan dalam upaya meningkatkan profesionalitas pemerintah daerah, pola pelaksanaan reformasi birokrasi bersifat iteratif yang terus menyesuaikan dengan dinamika tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang lebih baik.

Sebagai pemangku urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satpol PP harus dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku dan kode etik yang telah ditetapkan.

- VISI Walikota Batam Tahun 2021-2026 :
 - ***Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang modern dan Sejahtera***
- MISI Walikota Batam Tahun 2021-2026
 1. Mewujudkan Pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
 2. Mewujudkan Pembangunan Kota Batam yang berkelanjutan didukung infrastuktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju, ramah, aman, asri dan nyaman sesuai tata ruang.
 3. Mewujudkan sdm yang berdaya saing, berbudaya produktif dan berakhlak mulia
 4. Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.
 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsive, efektif dan efesien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

Dari 5 (lima) Misi Walikota Batam di atas, yang relevan dan penting bagi Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah di Misi 3 yaitu ***Mewujudkan sdm yang berdaya saing, berbudaya produktif dan berakhlak mulia***, Tujuannya Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul dan bertakwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk pencapaian Visi misi tersebut Satpol PP telah mencapai target secara realisasi dan kinerja yang baik.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Batam

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	57.740.254.574	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	73.637.089.551	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	31.924.414.996	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	64.064.412.151	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	195 orang /bulan	31.860.754.996	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	601 Orang /bulan	64.064.412.151	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	300 Dokumen	63.660.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	-	-	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	1.251.508.321	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	681.246.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 Paket	1.251.508.321	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	667.110.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Batam	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	-	0	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Batam	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	3 orang	14.136.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	620.510.533	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	372.256.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah paket Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	7.699.461	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah paket Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	5.710.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Paket	142.228.551	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Paket	68.562.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket	187.196.285	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	96.963.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	53.849.164	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	28.284.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	4 Dokumen	7.997.420	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	2 Dokumen	3.600.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	12 Laporan	221.539.652	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	12 Laporan	169.137.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %	1.602.991.257	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %	1.533.753.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	2 Unit	806.916.830	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	682.686.000	
Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Unit	286.015.632	Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah paket mebel yang disediakan	105 Unit	651.997.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 Unit	510.058.795	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	17 Unit	199.070.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	20.555.489.402	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	6.693.312.400	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah laporan penyediaan jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	243.921.322	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah laporan penyediaan jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	194.412.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	20.311.568.080	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	6.498.900.400	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100%	1.785.340.065	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100%	292.110.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	89.704.399	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	88.280.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara, dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 Unit	497.761.665	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara, dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 Unit	137.550.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	65 Unit	28.624.100	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34 Unit	23.680.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4 Unit	1.169.249.901	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	42.600.000	
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Batam	1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	4.394.759.344	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Batam	1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	1.417.850.000	
		2. Persentase penegakan Perda dan Perkada	100%				2. Persentase penegakan Perda dan Perkada	100%		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		3. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	100%				3. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	100%		
Penanganan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	1. Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani. 2. Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan. 3. Persentase Polisi Pamong Praja yang memenuhi standar kualifikasi. 4. Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada. 5. Persentase jenis sarpras trantibum yng terpenuhi sesuai kebutuhan.	100% 100% 100% 100% 100%	3.269.712.573	Penanganan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	1. Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani. 2. Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan. 3. Persentase Polisi Pamong Praja yang memenuhi standar kualifikasi. 4. Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada. 5. Persentase jenis sarpras trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan .	100% 100% 100% 100% 100%	1.212.951.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	53.690.682	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	85.998.000	
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Batam	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan ketertiban umum	1 Dokumen	148.618.847	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Batam	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan ketertiban umum	1 Dokumen	39.685.000	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi PamongPraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuasa Hak Asasi Manusia	Kota Batam	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dan ditingkatkan kapasitasnya	25 Orang	281.733.291	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuasa Hak Asasi Manusia	Kota Batam	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dan ditingkatkan kapasitasnya	-	-	
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	53.690.682	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	13.924.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Batam	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	10 dokumen	60.000.000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Batam	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 dokumen	12.802.000	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan Dasar Pol PP Fungsional pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Kota Batam	Jumlah Aparatur Satpol PP Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	-	0	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan Dasar Pol PP Fungsional pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Kota Batam	Jumlah Aparatur Satpol PP Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	15 Orang	150.886.000	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Kota Batam	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	-	0	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Kota Batam	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	40 orang	34.536.000	
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksaaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Batam	Jumlah Laporan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	100 Laporan	163.939.128	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksaaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Batam	Jumlah Laporan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawasan	12 Laporan	68.880.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Batam	Jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	100 Laporan	1.004.982.186	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Batam	Jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	19 Laporan	370.100.000	
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani, Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani.	1 Laporan	53.690.682	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani, Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani.	1 Laporan	50.000.000	
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	15 Unit	1.449.367.075	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	8 Unit	386.140.000	
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Batam	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	100%	997.082.547	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Batam	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	100%	173.037.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Batam	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda dan perkara	12 Laporan	71.387.131	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Batam	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	3 Laporan	14.487.000	
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Batam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	6 Laporan	244.442.937	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	3 Laporan	29.850.000	
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Batam	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	30 Laporan	681.252.479	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Batam	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	14 Laporan	128.700.000	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Kota Batam	Rasio PPNS Satpol PP	7.28%	127.964.224	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Kota Batam	Rasio PPNS Satpol PP	6.31%	31.862.000	
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS penegak perda	3 Laporan	127.964.224	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS penegak perda	1 Laporan	31.862.000	
Total				62.135.076.918	Total				75.054.939.551	

Pada review rancangan RKPD tahun 2025 ini Indikator dan Satuan Target disesuaikan dengan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317

2.5 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencananaan Pembangunan Nasional adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan kepada pemerintah melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun secara langsung kepada Perangkat Daerah terkait.

Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam akan memperhatikan usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat baik melalui Musrenbang maupun yang disampaikan langsung kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

Untuk sementara usulan program dan kegiatan dari masyarakat untuk Satuan Polisi Pamong Praja belum ada.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Tahun 2025
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, visi pembangunan nasional adalah "**Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur**". Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi, yaitu:

- 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
- 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
- 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
- 6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
- 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya.

Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN secara ringkas adalah sebagai berikut:

- 1) RPJMN ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.

- 2) RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.
- 3) RPJMN ke-3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.
- 4) RPJMN ke-4 (2020–2024) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Saat ini kita telah memasuki RPJMN ke-4 (2020-2024) yang merupakan periode ke-2 kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang kini berpasangan dengan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin setelah kembali terpilih pada Pemilu tanggal 17 April 2019 dan telah dilantik pada 20 Oktober 2019.

Visi Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi yang ditetapkan adalah:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Pemerintah menetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

7 (tujuh) agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 di atas tetap dipertahankan sebagai prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi:

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan;

3.2. Tujuan, dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah adalah **“Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum”**.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah:

- a. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Menurunnya pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum dan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Rincian tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Batam

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Keteriban Umum dan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	11,10%	12,50%	14,30%	16,70%	20%	25%
		1. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggara n urusan Pemeritahan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	80	82	84	86	88	90
		2. Menurunnya pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum dan pelanggaran Perautran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.Persentase penurunan Pelanggaran Trantibum	11,10%	12,50%	14,30%	16,70%	20%	25%
			2. Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11,10%	12,50%	14,30%	16,70%	20%	25%

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mempunyai 2 Program, 9 kegiatan dan 34 sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
 - 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya;
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota:
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
 - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat
 - Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;

- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
 - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada;
 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota:
- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

3.4 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tahun 2025 antara lain:

- a. Pencapaian target pada rencana strategis (RENSTRA) satuan polisi pamong praja kota batam tahun 2021-2026.
- b. Pencapaian SPM (standar pelayanan minimal) pada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum, yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat di kota batam.
- c. Menyesuaikan dengan perkiraan pagu anggaran satuan polisi pamong praja kota batam tahun anggaran 2025.
- d. Permasalahan dan isu – isu strategis menyangkut situasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kota batam, seperti masih tingginya pelanggaran perda, unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- e. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja
- f. Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten.
- g. Kurang Efektif dalam menjalin hubungan koordinasi dengan Instansi Pendukung.

Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025 adalah berikut:

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				75.054.939.551				64.514.850.364
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	100%	73.637.089.551	APBD		100%	59.951.706.324
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Batam	100%	64.064.412.151	APBD		100%	33.147.120.090
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	601 orang /bulan	64.064.412.151	APBD		195 orang /bulan	33.083.460.090

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	100%	0	APBD		300 Dokumen	63.660.000
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	Kota Batam	100%	681.246.000	APBD		100%	1.299.441.090
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Batam	1 Paket	667.110.000	APBD		2 Paket	1.299.441.090
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Kota Batam	3 orang	14.136.000	APBD		-	0
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	100%	372.256.000	APBD		100%	644.276.086
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	5.710.000	APBD		1 Paket	7.994.350
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	7 Paket	68.562.000	APBD		7 Paket	147.675.904

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Paket	96.963.000	APBD		3 Paket	194.365.903
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	3 Paket	28.284.000	APBD		2 Paket	55.911.587
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Batam	2 Dokumen	3.600.000	APBD		4 Dokumen	8.303.722
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	12 Laporan	169.137.000	APBD		4 Laporan	230.024.620
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Kota Batam	100 %	1.533.753.000	APBD		100%	1,664,385,822
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Batam	1 Unit	682.686.000	APBD		2 Unit	837.821.745
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Batam	105 Unit	651.997.000	APBD		5 Paket	296.970.031

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	17 Unit	199.070.000	APBD		6 Unit	529.594.046
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Kota Batam	100%	6.693.312.400	APBD		100%	21.342.764.646
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	194.412.000	APBD		12 Laporan	253.263.508
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	6.498.900.400	APBD		12 Laporan	21.089.501.138
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	Kota Batam	100%	292.110.000	APBD		100%	1.853.718.590
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	2 Unit	88.280.000	APBD		2 Unit	93.140.078

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	11 Unit	137.550.000	APBD		20 Unit	516.825.937
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	34 Unit	23.680.000	APBD		70 Unit	29.720.403
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam	2 Unit	42.600.000	APBD		4 Unit	1.214.032.172
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	Kota Batam	100%	1.417.850.000	APBD		100%	4.563.144.040
						2. Persentase Penegakan Perda dan Perkada		100%				100%	
						3. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada		100%				100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum yang Ditangani	Kota Batam	100%	1.212.951.000	APBD		100%	3.395.007.978
						2.Persentase Satlinmas yang Terlatih dan Dikukuhkan	Kota Batam	100%				100%	
						3. Persentase Polisi Pamongpraja yang Memenuhi Standar Kualifikasi	Kota Batam	87%				100%	
						4. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	Kota Batam	4 Laporan				4 Laporan	
						5. Persentase Jenis Sarpras Trantibum yang Terpenuhi Sesuai Kebutuhan	Kota Batam	100%				100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	1 Dokumen	85.998.000	APBD		1 Dokumen	55.747.035
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Batam	1 Dokumen	39.685.000	APBD		1 Dokumen	154.376.362
1	05	02	2.01	0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kota Batam	2 Dokumen	13.924.000	APBD		1 Dokumen	55.747.035
1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Kota Batam	1 dokumen	12.802.000	APBD		-	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	02	2.01	0010	Peningkatan Kapastias SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah aparaturn Satpol pp yang mengikuti Pendidikan dan pealtihan dasar polisi pamong praja	Kota Batam	15 Orang	150.886.000	APBD		-	0
1	05	02	2.01	0013	Peningkatan Kapastias SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Batam	40 orang	34.536.000	APBD		-	0
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Batam	12 Laporan	68.880.000	APBD		100 Laporan	170.217.997
1	05	02	2.01	0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kota Batam	19 Laporan	370.100.000	APBD		30 Laporan	1.105.771.003

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani.	Kota Batam	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	55.747.035
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kota Batam	8 Unit	386.140.000	APBD		15 Unit	1.504.877.834
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	Kota Batam	100%	173.037.000	APBD		100%	1.035.270.809
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kota Batam	3 Laporan	14.487.000	APBD		12 Laporan	74.121.258
1	05	02	2.02	0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	Kota Batam	3 Laporan	29.850.000	APBD		6 Laporan	253.805.101

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Kota Batam	14 Laporan	128.700.000	APBD		30 Laporan	707.344.449
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Kota Batam	Kota Batam	7.69%	31.862.000	APBD		8.72%	132.865.254
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS penegak perda	Kota Batam	1 Laporan	31.862.000	APBD		3 Laporan	132.865.254
Total									75.054.939.551				64.514.850.364

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							75.054.939.551				64.514.850.364			
1	05	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							73.637.089.551				59.951.706.324			
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							64.064.412.151				33.147.120.090			
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	601 Orang/ bulan		64.064.412.151	DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			195 Orang/ bulan	33.083.460.090	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	-		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300 Dokumen	63.660.000	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							681.246.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.299.441.090		
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	1 Paket		667.110.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 paket	1.299.441.090	
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	3 orang		14.136.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	0	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							372.256.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah			644.276.086		
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	1 Paket		5.710.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	7.994.350	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	7 Paket		68.562.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 paket	147.675.904	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	4 Paket		96.963.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 paket	194.365.903	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	3 Paket		28.284.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	55.911.587	
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	2 Dokumen		3.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	8.303.722	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	12 Laporan		169.137.000	PENDAPATA68 N ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	230.024.620	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1.533.753.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.664.385.822	
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	1 Unit		682.686.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	837.821.745	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	105 Unit		651.997.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	296.970.031	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	17 Unit		199.070.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	529.594.046	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								6.693.312.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			21.342.764.646	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	12 Laporan		194.412.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Laporan	253.263.508	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	12 Laporan		6.498.900.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	21.089.501.138	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							292.110.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.853.718.590		
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	2 Unit		88.280.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	93.140.078	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	11 Unit		137.550.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Unit	516.825.937	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	34 Unit		23.680.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70 Unit	29.720.403	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	2 Unit		42.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Unit	1.214.032.172
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							1.417.850.000	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			4.563.144.040		
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							1.212.951.000	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			3.395.007.978		
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota		1 Dokumen		85.998.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	55.747.035
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota		1 Dokumen		39.685.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	154.376.362
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota		26 Orang		292.523.676	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia													
1	05	02	2.01	0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota		2 Dokumen		13.924.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	55.747.035	
1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota		1 Dokumen		12.802.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	0	
1	05	02	2.01	0010	Peningkatan Kapastias SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional		Jumlah aparaturnya Satpol pp yang mengikuti Pendidikan dan pealtihan dasar polisi pamong praja		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota		15 Orang		150.886.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	0	
1	05	02	2.01	0013	Peningkatan Kapastias SDM Satuan Perlindungan Masyarakat		Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota		40 Orang		34.536.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		68.880.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Laporan	170.217.997	
1	05	02	2.01	0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19 laporan		370.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Laporan	1.105.771.003	
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota		1 Laporan		50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	55.747.036	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							dan Perkada yang Terlayani											
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota		8 Unit		386.140.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Unit	1.504.877.834	
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							173.037.000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			1.035.270.809		
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Laporan		14.388.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	74.121.258	
1	05	02	2.02	0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai SOP		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Laporan		29.850.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	253.805.101	
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14 Laporan		128.700.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		30 Laporan	707.344.449	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah												
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							31.870.000					132.865.254		
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah Laporan Hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS penegak perda		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota		1 Laporan		31.870.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			3 Laporan	132.865.254	
TOTAL													75.054.939.551					64.514.850.364	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra dan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang disingkat RKA Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Oleh karena itu pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Renja Tahun 2025 ini sangat bergantung pada ketersediaan anggaran Pemerintah Kota Batam yang tertuang dalam APBD, sehingga apabila di kemudian hari terjadi defisit anggaran, maka akan dilakukan penyesuaian target kinerja dengan kemampuan anggaran yang ada.

Renja Tahun 2025 ini hendaknya menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Demikian Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI